



PARTAI POLITIK

Oleh : Nur Hidayah

A. ASAL USUL PARTAI POLITIK

1. Teori Kelembagaan : partai politik dibentuk oleh kalangan legislative (dan eksekutif) karena ada kebutuhan para anggota parlemen untuk mengadakan kontak dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.



2. Teori Situasi Historik : partai politik terbentuk karena adanya suatu sistem politik yang mengalami transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi bentuk modern yang berstruktur kompleks.



3. Teori Pembangunan : partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. Perubahan-perubahan yang terjadi di bidang sosial ekonomii lah yang menjadi penyebab lahirnya partai politik.



44 PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2009

www.infokepanjen.com



InfoKePanjen.com

sedikit informasi, tapi banyak!

B. FUNGSI PARTAI POLITIK

1. Sosialisasi politik

Proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat

2. Rekrutmen Politik

Seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan sistem politik dan pemerintahan.



3. Partisipasi politik

Kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum, serta penentuan pemimpin pemerintahan



4. Pemadu kepentingan

Menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan dengan parai politik. Fungsi ini sangat menonjol dalam sistem politik demokrasi. Karena dalam sistem politik totaliter, kepentingan dianggap seragam maka partai politik dalam sistem ini kurang melaksanakan fungsi pemaduan kepentingan.



5. Komunikasi politik

Proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Fungsi parai politik menjadi komunikator politik.



6. Pengendalian konflik

Melalui dialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dalam musyawarah untuk mencapai penyelesaian yang berupa keputusan politik.



7. Kontrol politik

Kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam satu isi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.



C. TIPOLOGI PARTAI POLITIK

Pengklasifikasian berdasarkan kriteria tertentu seperti : asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan. Meskipun sebenarnya klasifikasi ini merupakan tipe ideal yang sulit ditemukan dalam kenyataan, namun hal ini berguna untuk memudahkan pemahaman.



1. ASAS DAN ORIENTASI

Berdasarkan kriteria ini partai politik dibagi menjadi tiga tipe :

a. Pragmatis

Partai politik yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu.



b. Doktriner

Partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan kongkret sebagai penjabaran ideology. Ideologi yang dimaksud adalah seperangkat nilai politik yang dirumuskan secara kongkret dan sistematis dalam bentuk program-program kegiatan yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai.



c. Kepentingan

Partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti : petani, buruh, etnis, agama atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.



2. BASIS SOSIAL DAN TUJUAN

Almond menggolongkannya menjadi empat tipe berdasarkan basis sosialnya yaitu :

- a. Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah dan bawah.
- b. Partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh dan pengusaha.



- c. Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu, seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan lainnya
- d. Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu, seperti suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu.



BERDASARKAN TUJUANNYA, DIGOLONGKAN MENJADI TIGA TIPE :

- a. Partai perwakilan kelompok ;
menghimpun berbagai kelompok untuk
memenangkan kursi di parlemen seperti
Barisan Nasional di Malaysia
- b. Partai pembinaan bangsa : bertujuan
menciptakan kesatuan nasional dan
biasanya menindas kepentingan sempit
seperti Partai Aksi Rakyat di Singapura.



c. Partai Mobilisasi : berupaya memobilisasi masyarakat ke arah pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemimpin partai, sedangkan partisipasi dan perwakilan kelompok cenderung diabaikan.



D. SISTEM KEPARTAIAN

Yaitu pola perilaku dan interaksi di antara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik. Maurice Duverger, membagi sistem kepartaian menjadi 3 yaitu : tunggal, dwi partai dan banyak partai.



Namun hal ini juga menuai kritik karena :

1. Tidak ada batasan yang jelas antara partai tunggal totaliter (komunis atau fasis) dengan bentuk partai tunggal otoriter yang banyak dijumpai di negara berkembang dan bentuk partai tunggal dominan (tidak totaliter maupun otoriter) seperti yang diterapkan di Jepang.



2. Di samping itu sejumlah negara di dunia ada yang tidak memiliki partai politik, sebagaimana yang terdapat pada sistem politik Otokrasi Tradisional, seperti Brunei Darussalam dan Arab Saudi.
3. Penggolongan sistem kepartaian tersebut hanya berdasar pada jumlah partai saja.



- Sedangkan Giovanni Sartori mengklasifikasikan sistem kepartaian bukan berdasarkan jumlah partai, akan tetapi berbasis pada jarak ideologi.



KLASIFIKASI SISTEM KEPARTAIAN MENURUT GIOVANNI SARTORI

Sistem partai	Kutub	Polaritas	Arah
Pluralisme sederhana	Bipolar	Tidak ada	Sentripetal
Pluralisme moderat	Bipolar	Kecil	Sentripetal
Pluralisme ekstrim	Multipolar	Besar	Sentrifugal



Yang dimaksud *bipolar* yaitu kegiatan aktual suatu sistem partai yang bertumpu pada dua kutub, meskipun jumlah partai lebih dari dua karena sistem kepartaian ini tidak memiliki perbedaan ideology yang tajam.

Sedangkan *multipolar* yaitu sistem partai yang bertumpu pada lebih dari dua kutub yang biasanya terdiri atas lebih dari dua partai dan diantara kutub-kutub tersebut terdapat perbedaan ideology yang tajam.



Yang dimaksud dengan *sentripetal* yaitu perilaku politik menuju ke pusat (integrasi nasional). Sedangkan *sentrifugal* : perilaku politik menjauhi pusat atau hendak mengembangkan sistem tersendiri



:



SUMBER

- Cholisin, M. Si dkk. 2006. Dasar-dasar Ilmu Politik. Yogyakarta : FISE UNY
- Surbakti, Ramlan, “ Memahami Ilmu Politik “, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992

